



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**RENCANA STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU**

TAHUN 2014 – 2018



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

©2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Setdapropsu Tahun 2014 - 2018 berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU untuk 4 (empat) tahun mendatang, karena itu Rencana Strategis ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menggambarkan program dan kegiatan yang dapat dan harus dikerjakan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

Hal tersebut sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Bab II tentang Sekretariat Daerah, bagian kesebelas Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Pasal 52 dinyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai tugas membantu SekdaprovSU dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menyelenggarakan fungsi – fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaporan administrasi pembangunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pelaporan, usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas di Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Setdapropsu berpegang pada budaya kerja seperti :

- Mengutamakan ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektivitas dalam bekerja.
- Mengutamakan disiplin dan waktu
- Berusaha bekerja dalam satuan tim secara efisien, kreatif, produktif, adaptif dan inovatif
- Berorientasi kepada hasil kerja yang prima.
- Hemat dengan penggunaan dana, sarana dan prasarana.
- Siap bekerja secara berkualitas.

Rencana Strategis ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Setdapropsu juga sebagai pedoman/ arah bagi setiap personil Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dalam melaksanakan tugas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Setdapropsu disamping sebagai alat kendali dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga untuk memberikan kejelasan dan keterarahan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Sumatera Utara dalam 4 (empat) tahun yang akan datang.

C. DASAR HUKUM.

Dasar-Dasar dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

D. SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Setdaprovsu disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Pelayanan SKPD |
| BAB III | : Isue-Isue Strategis Berdasarkan Tupoksi |
| BAB IV | : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan |
| BAB V | : Rancangan Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif |
| BAB VI | : Indikator Kinerja yang mengacu pada Fungsi dan Sasaran RPJMD (matrik terlampir) |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin kepada staf lingkup Biro Administrasi Pembangunan;
2. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. Menyelenggarakan penetapan data/bahan dalam bidang administrasi pembangunan;
4. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dibidang evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dibidang evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian, pelaksanaan pembangunan
6. Menyelenggarakan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, standar, norma dan kriteria penyelenggaraan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
7. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi/ penatausahaan Biro
8. Menyelenggarakan perumusan penyelenggaraan konsultasi dan asistensi dibidang administrasi pembangunan;
9. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan perumusan penyelenggaraan administrasi pembangunan;
10. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan
13. Menyelenggarakan perumusan usulan penetapan pejabat pelaksana pengelola kegiatan dibidang anggaran pendapatan belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Menyelenggarakan perumusan penetapan laporan penyelenggaraan administrasi pembangunan, LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal/terkait, lembaga dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
16. Menyelenggarakan rapat internal dan eksternal penyelenggaraan administrasi pembangunan;
17. Menyelenggarakan analisa dan pengkajian penyelenggaraan pengelolaan administrasi pembangunan;
18. Menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim penyelenggara pengelola administrasi pembangunan;
19. Menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
20. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
21. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
22. Menyelenggarakan perumusan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas diatas, Kepala Biro Administrasi Pembangunan di bantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dengan tugas fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Evaluasi Pembangunan

Bagian Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi/ ketatausahaan, hasil pembangunan, pendataan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bagian evaluasi pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang evaluasi pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibidang evaluasi pembangunan;

- e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan bidang evaluasi pembangunan, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Biro, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut di atas, Kepala Bagian Evaluasi Pembangunan dibantu oleh :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan;
- 3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi.

2. Bagian Bina Usaha Jasa

Bagian Bina Usaha Jasa mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan jaringan aspirasi masyarakat jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Bina Usaha Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Bina Usaha Jasa;
- b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Bina Usaha Jasa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bina Usaha Jasa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Bina Usaha Jasa;
- f. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kepala Bagian Bina Usaha Jasa dibantu oleh :

1. Sub Bagian Pengaturan dan Pemberdayaan
2. Sub Bagian Pengawasan
3. Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat Jasa Konstruksi

3. Bagian Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan penyelenggaraan analisa program pembangunan, sosial budaya dan ekonomi fisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian dibidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan penyelenggaraan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, sesuai standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Analisa Program Pembangunan
2. Sub Bagian Sosial Budaya dan Ekonomi
3. Sub Bagian Fisik dan Prasarana

Berdasarkan tugas Pokok dan fungsi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU didukung oleh kekuatan berbagai Sumber Daya yang ada seperti : jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Isue-Isu Strategis berdasarkan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Setdaprovsu sebagai berikut :

- 1) Adanya berbagai kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah pelaksana Pembangunan
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka menginformasikan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan
- 3) Adanya kemauan menjalin kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah pelaksana pembangunan.
- 4) Perubahan-Perubahan Perundang-Undangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Semakin meningkatnya pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pembangunan
- 6) Meningkatnya persaingan dalam kalangan dunia usaha
- 7) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi informatika
- 8) Meningkatnya Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan sesuai Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 yaitu “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”, Dan Misi: Reformasi Birokrasi Berkelanjutan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih *Good Governance dan Clean Government* maka dirumuskan Visi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU SetdaprovSU sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”**

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mengandung arti bahwa Pengendalian kegiatan dimaksud agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat.
 - Tepat waktu, setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam batas waktu 1 (satu) tahun anggaran
 - Tepat mutu, pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang diisyaratkan
 - Tertib administrasi, masing-masing kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - Tepat sasaran, kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan sasaran teknis fungsional yang telah ditentukan dalam perencanaan
 - Tepat manfaat, kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang semaksimal mungkin, sebagaimana ditentukan dalam perencanaan kegiatan yang bersangkutan.
2. Transparan mengandung arti bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai kegiatan pembangunan hasilnya dapat diketahui dan terbuka bagi masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Akuntabel bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

B. MISI.

Untuk merealisasi visi dan memberikan gambaran yang jelas tentang usaha dan upaya yang harus dilakukan, maka dirumuskan Misi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Setdaprovsu. Misi Biro Administrasi Pembangunan adalah :

- a. Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- b. Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.

C. TUJUAN DAN SASARAN.

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
2. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

2. SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 1 dan 2

tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran:

- 1.1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri
- 1.2. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- 2.1 Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- 2.2 Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

1. Strategi.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis program/kegiatan sebagaimana telah diatur atau ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011, dimana sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan

- 1.1.1. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan Pameran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.
- 1.1.2. Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan
- 2.1.1. Adanya peningkatan pemahaman jasa penyedia Barang/Jasa.
- 2.1.2. Adanya kelancaran pelaksanaan proses tender pada Dinas/Instansi Pemprov.
- 3.2.1. Adanya operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regional Sumut
- 3.2.2. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik.

3. Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
- b. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola partisipasi dan berkelanjutan.
- c. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program

Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sesuai dengan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2. Kegiatan

Dari berbagai Program di atas, akan diselenggarakan berbagai rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sesuai dengan pendanaan yang diperoleh setiap tahunnya. Kegiatan pada program dimaksud dapat tertuang dalam Renja tahunan seterusnya terperinci dalam RKA, namun Kegiatan pada masing-masing program tidak seluruhnya dapat terealisasi atau terakomodir dalam Dokumen Perencanaan Anggaran, disebabkan efisiensi dan prioritas anggaran.

Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan |
|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.20 1.20.03 1.20.03.10.01 | Urusan Wajib Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| 1.20.03.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Output : Terlaksananya kelancaran tugas administrasi dan Keuangan Outcome : Terbantunya kelancaran tugas administrasi dan Keuangan |
| 1.20.03.06.06 | Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kerja (PK) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu | Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Biro Adm, Pembangunan Outcome : Tersusunnya LK dan PK Biro Adm. Pembangunan |
| 1.20.03.06.06 | Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu | Output : Terlaksananya Penyusunan RKPD dan Renja Outcome : Tersusunnya RKPD dan Renja Biro Adm. Pembangunan |

| | | |
|---------------|--|--|
| 1.20.03.06.08 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu | Output : Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA Outcome : Tersusunnya RKA dan DPA Biro Adm.Pembangunan |
| 1.20.03.05.33 | Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi | Output : Terlaksananya tata usaha perkantoran,kearsipan perpustakaan dan dokumentasi Outcome : Terselenggaranya tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi |
| 1.20.03.01.03 | Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja | Output : Pemeliharaan Komputer di Biro Adm. Pembangunan Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor |
| 1.20.03.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Terlaksananya keperluan Alat Tulis Kantor |
| 1.20.03.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Output : Tersedianya Barang Cetak Outcome : Terlaksananya Program Kegiatan Perkantoran |
| 1.20.03.02.48 | Belanja Surat Kabar dan Majalah | Output : Tersedianya surat kabar dan majalah Outcome : Terlaksananya keperluan perkantoran |
| 1.20.03.01.06 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Outcome : Terlaksananya rapat-rapat dengan Dinas/Instansi Terkait |
| 1.20.03.01.07 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Outcome : Meningkatkan Koordinasi Kerja Ke Luar Daerah |
| 1.20.03.10.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| 1.20.03.33.23 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) Sumatera Utara | output : pengadaan sarana LPSE Provsu Outcome : terpenuhinya sarana dan prasarana LPSE Provsu |
| 1.20.03.10.03 | Peningkatan disiplin aparatur | |
| | Outbound PNS Biro | Output : Outcome : Persentase kedisiplinan pegawai meningkat |
| 1.20.03.10.04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| 1.20.03.10.01 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | Output : Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan SDM Pejabat/Pegawai Outcome : Terdidik dan Terlatihnya Pejabat/ Pegawai di Bidang Tugasnya |
| 1.20.03.10.05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |
| 1.02.03.33.06 | Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu | Output : Buku Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu Outcome : Tersedianya Buku Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu |

| | | |
|---------------|--|---|
| 1.02.03.33.07 | Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota (TEPPA-UKP4)se-Sumatera Utara | Output : Rekapitulasi Aktivitas Pengadaan APBD SKPD Provsu dan Pemerintah Kab/Kota Outcome : Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di TEPPA- UKP4 |
| 1.20.03.33.16 | Monitoring dan pelaporan tindak lanjut hasil evaluasi APBD Kab/Kota | output : Laporan hasil pengendalian kegiatan Outcome : Pelaksanaan kegiatan APBD lebih efektif, efisien, tepat mutu dan sasaran. |
| 1.20.03.10.06 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | |
| 1.02.03.33.01 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara | Output : Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pekan Raya Sumatera |
| 1.02.03.33.02 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia | Output : Mengikuti Pesta Pulau Pinang di Malaysia Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pesta Pulau Pinang |
| 1.02.03.33.03 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov mengikuti Sumatera Expo di Batam | Output : Mengikuti Sumatera Expo di Batam Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Sumatera Expo di Batam |
| 1.02.03.33.04 | Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov di Dalam dan Luar Negeri | Output : Memfasilitasi Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov dalam Mengikuti Expo atau gelar produk Kerajinan di dalam dan luar negeri Outcome : Terikutinya Expo dan Gelar Produk Kerajinan di dalam dan luar negeri oleh Dekranasda dan Mitra binaanya |
| 1.02.03.33.05 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Jakarta | Output : Mengikuti Pekan Raya Jakarta Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pekan Raya Jakarta |
| 1.02.03.33.08 | Operasional Gedung Wisma Promosi Center Sumut di P. Pinang/Malaysia | Output : Terpromosinya Hasil Kerajinan,Pabrik,Industri,Seni Budaya dan Objek Wisata yang ada di Sumut Outcome : Terkenalnya hasil pembangunan Provsu di Bidang industri (Kerajinan Tangan dan pabrika), seni budaya dan pariwisata di Pulau Pinang/ Malaysia |
| 1.20.03.33.09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu | Output : Buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan APBD Povus Outcome : Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKS/DPA SKPD setiap tahun |
| 1.20.03.33.10 | Sosialisasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Provsu | Output : Sosialisasi tentang Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai target, waktu, tepat mutu, tertib administrasi Tepat sasaran dan bermanfaat |
| 1.20.03.33.11 | Biaya Internet Connection untuk LPSE Provsu | Output : Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik Outcome : Meningkatnya transparansi, |

| | | |
|---------------|---|---|
| | | efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah |
| 1.20.03.33.12 | Fasilitasi Penyusunan RKA Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara | Output : Tersusunnya RKA Setdaprovsu Outcome : Terlaksananya Penyusunan RKA Setdaprovsu dengan baik dan benar |
| 1.20.03.33.13 | Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Output : Laporan hasil pengendalian kegiatan Outcome : Pelaksanaan kegiatan APBD lebih efektif efisien, tepat mutu dan sasaran. |
| 1.20.03.33.14 | Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu | Output : SK para pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Outcome : Mendukung tertib administrasi, terwujudnya para pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang kompeten |
| 1.20.03.33.15 | Sosialisasi Penyusunan RKA bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sum.Utara TA.2015 | Output : Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Meningkatkan kemampuan SDM di SKPD dalam penyusunan RKA/DPA APBD Provusu |
| 1.20.03.33.17 | Pengendalian Kegiatan APBD Provusu Bantuan Keuangan Provinsi se- Sumatera Utara | Output : Laporan Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Outcome : Pelaku Kegiatan APBD Bantuan Keuangan Daerah (BKP) Lebih Efisien dan Efektif |
| 1.20.03.33.18 | Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara | output : Sosialisasi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Outcome : Meningkatkan pemahaman para Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara |
| 1.20.03.33.19 | Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah | output : Pembinaan kepada Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Outcome : Meningkatkan pemahaman para PNS/Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah. |
| 1.20.03.33.20 | Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara | output : Terawatnya perangkat layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Outcome : Meningkatkan efisien, efektifitas transaksi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah |
| 1.20.03.33.21 | Sosialisasi Monev Online bagi SKPD di Sumatera Utara | output : Sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah Outcome : Terlatihnya panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. |
| 1.20.03.33.22 | Rapat Koordinasi Tim Pengelola LPSE se Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara | output : menerima masukan-masukan dari tim pengelola LPSE Kab/Kota se Sumatera Utara Outcome : membahas berbagai permasalahan yang dihadapi tim pengelola LPSE Kab/ kota se Sumatera Utara |
| 1.20.03.33.24 | Pengelolaan Program Percepatan | output : Pembentukan dan Penetapan Kelompok |

| | | |
|---------------|---|---|
| | Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu | Outcome : Kerja Sanitasi Provinsi Sumut Terciptanya lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya PPSP melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi |
| 1.20.03.33.25 | Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu dan Keputusan Gubernur tentang Perjalanan Dinas | Output : Laporan pelaksanaan Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk teknis Kegiatan APBD Provsu dan Keputusan Gubernur Outcome : Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan RKA/DPA SKPD dan pertanggungjawaban Penggunaan |

C. PENDANAAN INDIKATIF

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Rencana Anggaran Tahun | | | |
|---------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 | Urusan Wajib | | | | |
| 1.20.03 | Sekretariat Daerah | | | | |
| 1.20.03.10.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| 1.20.03.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 134.440.000 | 139.440.000 | 144.440.000 | 149.440.000 |
| 1.20.03.01.03 | Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 1.20.03.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
| 1.20.03.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 1.20.03.02.48 | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 910.000 | 5.910.000 | 10.910.000 | 15.910.000 |
| 1.20.03.01.06 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.500.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 |
| 1.20.03.01.07 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 125.000.000 | 130.000.000 | 135.000.000 | 140.000.000 |
| 1.20.03.10.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| 1.20.03.33.23 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) Sumatera Utara | 22.300.000 | 27.300.000 | 32.300.000 | 37.300.000 |
| 1.20.03.10.03 | Peningkatan disiplin aparatur | | | | |
| | Outbound PNS Biro | | | 5.000.000 | 6.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.20.03.10.04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| 1.20.03.10.01 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 |
| 1.20.03.10.05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | |
| 1.02.03.33.06 | Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu | 217.000.000 | 222.000.000 | 227.000.000 | 232.000.000 |
| 1.02.03.33.07 | Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota (TEPRA-UKP4) se-Sumatera Utara dan Monev Online TEPRA Sismontep | 145.000.000 | 150.000.000 | 155.000.000 | 160.000.000 |
| 1.20.03.10.06 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | | | | |
| 1.02.03.33.01 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara | 206.000.000 | 211.000.000 | 216.000.000 | 221.000.000 |
| 1.02.03.33.02 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia | 355.000.000 | 360.000.000 | 365.000.000 | 370.000.000 |
| 1.02.03.33.03 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Sumatera Expo di Batam | 105.000.000 | 110.000.000 | 115.000.000 | 120.000.000 |
| 1.02.03.33.04 | Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov su dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov su di Dalam dan Luar Negeri | 545.000.000 | 550.000.000 | 555.000.000 | 560.000.000 |
| 1.02.03.33.05 | Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pekan Raya Jakarta | 245.000.000 | 250.000.000 | 255.000.000 | 260.000.000 |
| 1.02.03.33.08 | Operasional Gedung Wisma Promosi Center Sumut di P. Pinang/Malaysia | 370.000.000 | 375.000.000 | 380.000.000 | 385.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.20.03.33.09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu | 162.250.000 | 167.250.000 | 172.250.000 | 177.250.000 |
| 1.20.03.33.11 | Biaya Internet Connection untuk LPSE Provsu | 365.000.000 | 370.000.000 | 375.000.000 | 380.000.000 |
| 1.20.03.33.13 | Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 395.300.000 | 400.300.000 | 405.300.000 | 410.300.000 |
| 1.20.03.33.14 | Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu | 90.500.000 | 95.500.000 | 100.500.000 | 105.500.000 |
| 1.20.03.33.18 | Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara | 70.000.000 | 75.000.000 | 80.000.000 | 85.000.000 |
| 1.20.03.33.19 | Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah | 70.000.000 | 75.000.000 | 80.000.000 | 85.000.000 |
| 1.20.03.33.20 | Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara | 321.300.000 | 326.300.000 | 331.300.000 | 336.300.000 |
| 1.20.03.33.22 | Rapat Koordinasi Tim Pengelola LPSE se Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara | 75.000.000 | 80.000.000 | 85.000.000 | 90.000.000 |
| 1.20.03.33.24 | Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu | 145.000.000 | 150.000.000 | 155.000.000 | 160.000.000 |

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA FUNGSI DAN SASARAN RPJMD

Terlampir:

- 3.1.1. Tabel Matrix Program/Kegiatan Indikatif Tahun 2014 – 2018
- 3.1.2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
- 3.1.3. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
- 3.1.4. Tabel Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Setdapropsu ini, pada hakekatnya adalah merupakan bagian kecil dari keseluruhan upaya penerapan semangat Reorientasi, Refungsional, Reposisi dan Revitalisasi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Sumatera Utara.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tergantung kepada semangat segenap personil Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Setdapropsu, terutama dalam memanfaatkan setiap keberhasilan yang sekecil apapun, serta kemampuan untuk tidak mentolerir, apalagi melakukan kesalahan sekecil apapun.

Disisi lain keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini ditentukan pula oleh kemampuan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang produktif dan kreatif sesuai tuntutan kebutuhan yang terus berubah dan berkembang.

Medan, Juli 2013

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU**

Ir. IBNU S. HUTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195812061986031008

Lampiran

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU 2014-2018**

Tabel 5.1

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada awal tahun perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--|---|--|--------------------|---|--|--|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam mengikuti pameran hasil pembangunan sumatera utara melalui Stand masing-masing Instansi terkait pada Paviliun Pemprov Sumatera Utara di dalam dan luar negeri | 1. Terinformasikan nya dan terpromosikannya hasil - hasil pembangunan sumatera utara melalui Stand masing - masing Instansi terkait pada Paviliun Pemprov | 1. Jumlah pameran yang diikuti 2. Jumlah SKPD / Mitra Binaan yang mengikuti Pameran | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara | Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pekan Raya Sumatera | 41 SKPD beserta Mitra Binaannya | 40 SKPD | 250.000.000 | 41 SKPD beserta Mitra Binaannya | 275.000.000 | 41 SKPD beserta Mitra Binaannya | 300.000.000 | 41 SKPD beserta Mitra Binaannya | 330.000.000 | 41 SKPD beserta Mitra Binaannya | 350.000.000 | 41 SKPD beserta Mitra Binaannya | 1.505.000.000 | Biro Adm. Pembangunan | Medan |
| | | | | 2. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Pesta P.Pinang Malaysia | Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pesta Pulau Pinang | 25 Instansi/ SKPD dan 25 Kab/Kota | 20 Instansi/ SKPD dan 10 Kab/Kota | 350.000.000 | 20 Instansi/ SKPD dan 10 Kab/Kota | 360.000.000 | 20 Instansi/ SKPD dan 10 Kab/Kota | 370.000.000 | 22 Instansi/ SKPD dan 10 Kab/Kota | 380.000.000 | 25 Instansi/ SKPD dan 15 Kab/Kota | 390.000.000 | 25 Instansi/ SKPD dan 25 Kab/Kota | 1.850.000.000 | | Malaysia |
| | | | | 3. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Sumatera Expo di Batam | Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Sumatera Expo di Batam | 8 Instansi / SKPD | 6 Instansi / SKPD | 100.000.000 | 7 Instansi / SKPD | 110.000.000 | 8 Instansi / SKPD | 120.000.000 | 8 Instansi / SKPD | 130.000.000 | 8 Instansi / SKPD | 140.000.000 | 8 Instansi / SKPD | 600.000.000 | | Batam |
| | | | | 4. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov di Dalam dan Luar Negeri | Terikutinya Expo dan Gelar Produk Kerajinan di dalam dan luar negeri oleh Dekranasda dan Mitra binaannya | 6 Pameran/ expo | 3 Pameran/ expo | 500.000.000 | 4 Pameran/ expo | 510.000.000 | 4 Pameran/ expo | 520.000.000 | 5 Pameran/ expo | 530.000.000 | 6 Pameran/ expo | 540.000.000 | 22 Pameran/ expo | 2.600.000.000 | | Dalam dan Luar Negeri |
| 5. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Jakarta | Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam mengikuti Pekan Raya Jakarta | 16 Instansi / SKPD | 10 Instansi / SKPD | 300.000.000 | 10 Instansi / SKPD | 350.000.000 | 12 Instansi / SKPD | 360.000.000 | 14 Instansi / SKPD | 370.000.000 | 16 Instansi / SKPD | 380.000.000 | 16 Instansi / SKPD | 1.760.000.000 | | Jakarta | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada awal tahun perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|---|---|--|---|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|----------------------------------|--------|-------|
| | | | | | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | | | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 2. Pelaksanaan tertib administrasi serta pengumpulan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu dan TEPPA UKP4 | 1. Terlaksananya tertib administrasi serta pengumpulan pelaporan kegiatan APBD Provsu | 1. Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi | | 6. Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu | Buku Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu | 5 Buku 53 Instansi /SKPD | 5 Buku 33 Instansi /SKPD | 300.000.000 | 5 Buku 33 Instansi /SKPD | 300.000.000 | 5 Buku 35 Instansi /SKPD | 310.000.000 | 5 Buku 40 Instansi /SKPD | 320.000.000 | 5 Buku 50 Instansi /SKPD | 330.000.000 | 25 Buku 53 Instansi /SKPD | 1.560.000.000 | | Sumut |
| | 2. Terlaksananya tertib administrasi serta pengumpulan pelaporan hasil aktivitas pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di TEPPA-UKP4 | 2. Tersedianya Buku Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu 3. Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di TEPPA-UKP4 | | 7. Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota (TEPPA-UKP4) se-Sumatera Utara | Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di TEPPA-UKP4 | 53 Instansi /SKPD | 2 Buku 33 Instansi /SKPD | 200.000.000 | 2 Buku 33 Instansi /SKPD | 250.000.000 | 2 Buku 35 Instansi /SKPD | 250.000.000 | 2 Buku 40 Instansi /SKPD | 260.000.000 | 2 Buku 50 Instansi /SKPD | 270.000.000 | 10 Buku 53 Instansi /SKPD | 1.230.000.000 | | Sumut |
| 3. Pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD Provsu | 1. Ketepatan Waktu Penyusunan Pergub Juknis Pelaksanaan APBD Provsu | 1. Buku Juknis | | 8. Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu | diperolahnya buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan APBD Provsu sebagai Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKS/DPA SKPD setiap tahun | 53 set 53 Instansi /SKPD | 53 set 53 Instansi /SKPD | 250.000.000 | 53 set 53 Instansi /SKPD | 250.000.000 | 53 set 53 Instansi /SKPD | 255.000.000 | 53 set 53 Instansi /SKPD | 255.000.000 | 53 set 53 Instansi /SKPD | 260.000.000 | 53 set 53 Instansi /SKPD | 1.270.000.000 | | Sumut |
| 4. Promosi hasil-produk unggulan dan potensi Sumatera Utara di P. Pinang Malaysia | 1. Terkenalnya hasil pembangunan Provsu di Bidang industri (Kerajinan Tangan dan pabrikaan), seni budaya dan pariwisata di Pulau Pinang/ Malaysia | 1. Tingkat kunjungan ke Wisma Promosi Sumatera Utara di Pulau Pinang Malaysia per tahun 2. Jumlah pertemuan yang dilakukan di Wisma Promosi Sumatera Utara di Pulau Pinang Malaysia per tahun | | 9. Operasional Gedung Wisma Promosi Center Sumut di Pulau Pinang/Malaysia | Terpromosinya Hasil Kerajinan, Pabrikasi, Industri, Seni Budaya dan Objek Wisata yang ada di Sumatera Utara | nihil | 120 org | 450.000.000 | 125 org | 450.000.000 | 130 org | 460.000.000 | 135 org | 465.000.000 | 140 org | 470.000.000 | 650 org | 2.295.000.000 | | Sumut |
| 5. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara | 1. Terawatnya perangkat layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | 1. Jumlah SKPD yang melaksanakan lelang secara elektronik melalui LPSE | | 10. Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara | Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparansi dan akuntabel. | 23 SKPD | 23 SKPD | 600.000.000 | 42 SKPD | 600.000.000 | 42 SKPD | 610.000.000 | 42 SKPD | 615.000.000 | 42 SKPD | 620.000.000 | 42 SKPD | 3.045.000.000 | | Sumut |

